



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINEL PONTO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 279973

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

602.000.000

1. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BOALEMO, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.950 m2/121 m2 di KAB / KOTA
BOALEMO, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
3. Tanah Seluas 9.972 m2 di KAB / KOTA BOALEMO, HASIL
SENDIRI Rp. 45.000.000
4. Tanah Seluas 10.699 m2 di KAB / KOTA BOALEMO, HASIL
SENDIRI Rp. 42.000.000
5. Tanah Seluas 8.217 m2 di KAB / KOTA BOALEMO, HASIL
SENDIRI Rp. 35.000.000
6. Tanah Seluas 4.000 m2 di KAB / KOTA BOALEMO, HASIL
SENDIRI Rp. 30.000.000
7. Tanah Seluas 1.400 m2 di KAB / KOTA BOALEMO, HASIL
SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

24.500.000

1. MOTOR, Yamaha Yamaha 54P (MIO J) Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, Yamaha F1ZR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000



3. MOTOR, YAMAHA F1 Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. LAINNYA, HONDA GX120 Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.
1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	41.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.719.798
F. HARTA LAINNYA	Rp.	4.159.231
Sub Total	Rp.	680.379.029
III. HUTANG	Rp.	246.767.717
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	433.611.312

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA :
KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TWYNNUGROHO HADI WIYANTO
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 898114

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 112.000.000

1. Tanah Seluas 1.750 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI
Rp. 112.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO D1A02N19M1 A/T Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT HONDA ACH1M21B04 A/T Tahun 2014,
HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 24.727.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 179.527.000

III. HUTANG Rp. 4.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 175.327.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA : KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAHRUDIN**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN**
3. NHK : **810216**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 350.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/40 m2 di KAB / KOTA PAHUWATO, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 5.500.000**

1. MOTOR, HONDA MEGA PRO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 45.550.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 7.750.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 408.800.000**

III. HUTANG **Rp. 380.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 28.800.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA : KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NAIL
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 244205

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 455.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/6 m2 di KAB / KOTA MAROS,
Rp. 455.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 146.000.000

1. MOTOR, YAMAHA XEON 125 CC Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX 150 MMNMAX 150 MATIC Tahun 2020,
HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU XENIA XENIA 1,3 MANUAL Tahun 2018,
HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.555.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 51.235.531

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 684.790.531

III. HUTANG Rp. 114.572.448

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 570.218.083

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.